



PARTISIPASI MASYARAKAT SAMIN DALAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI DESA KLOPO DUWUR KABUPATEN BLORA

Agung Adi Purnomo [✉] Moh. Aris Munandar, Setiajid

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2013

Disetujui September 2013

Dipublikasikan

November 2013

Keywords:

Participation, Community

Samin, Compulsory

Education.

Abstrak

Masyarakat Samin Desa Klopo Duwur Kabupaten Blora sudah mengikuti pendidikan formal sejak dulu, tetapi mereka tidak mengikutinya secara serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Samin dalam wajib belajar sembilan tahun, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Samin dalam program wajib belajar sembilan tahun, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat Samin dalam program wajib belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di jaman yang sudah maju ini pendidikan formal bagi mereka adalah hal yang harus dilakukan sebagai upaya meraih kesejahteraan. Berbagai hal yang mempengaruhi masyarakat Samin dalam mengikuti pendidikan formal baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri, ada yang dipengaruhi dari lingkungan dan ada juga yang dipengaruhi oleh keinginan mencari kesejahteraan. Larangan untuk mendidik anak mengikuti pendidikan formal sudah terhapuskan, sekarang mereka sudah dapat mengikutinya sesuai kemampuan mereka masing-masing. Sekarang sekolah merupakan prioritas orang tua untuk mendidik anak-anaknya, meskipun tidak sepenuhnya keturunan Samin mendapatkan pendidikan dari sekolah. Hanya saja masih ada faktor penghambat yang membuat anak Samin tidak mengikuti wajib belajar, yaitu dari segi ekonomi dan dari sosial budaya di Desa Klopo Duwur Kabupaten Blora.

Abstract

Samin's Community in Klopo Duwur Village Blora Regency have taken formal education in a long time, but they didn't seriously take it. This research aimed to know the level of participation of Samineses in the nine-year educational program, the forms of participation of this society in the nine-year educational program, and acknowledge factors that hamper this community's participation in the nine-year educational program. The result of this research shows that in this modern era, formal education is something that this society's need to reach their welfare. Many things that influence this society in order to follow the formal education whether from the outsiders or from their own people, whether they are influenced by their environment or the hopes to reach the welfare. The prohibition to educate their children to join the formal education has been removed. Nowadays, they have joined it as well as their own capability. Nowadays, Formal education is the priority of parents to educate their children, even if some children of this society still haven't got the formal education. But, there are still another factor that make these Saminese children don't follow this nine-year educational program. They don't have the capability in terms of economical and socio-cultural background in Klopo Duwur village, Blora Regency

© 2013 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 Kampus Unnes Sekaran, Semarang, 50229

E-mail: jm_ucej@unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan tanpa adanya diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Soegito, 2009: 10).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib belajar, seharusnya tidak ada lagi warga negara yang tidak bersekolah, karena dalam program pemerintah ini setiap warga negara berhak menempuh pendidikan hingga lulus sekolah menengah pertama (SMP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa: "setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar". Baik itu dari berbagai suku, ras, budaya, agama, ataupun yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial baik di daerah terpencil dan terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, sehingga terciptanya tujuan negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan melaksanakan pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pemerintah menetapkan peraturan tentang program wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar memiliki fungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Tujuan wajib belajar adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat

mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sedulur sikep atau lebih dikenal dengan masyarakat Samin (Samin Surosentiko) di Kelopo Duwur, Kabupaten Blora memiliki tingkat partisipasi wajib belajar yang rendah. Sebagian besar keluarga mereka tidak memiliki ijazah atau bukti bahwa telah lulus dan mengikuti sebuah akademi (jenjang pendidikan), dapat dikatakan mereka selalu putus sekolah saat mengikuti pendidikan, padahal dulunya mereka mengikuti pembelajaran di sekolah, tapi tidak sampai tamat sekolah mereka sudah tidak mengikuti pembelajaran (tidak melanjutkan).

Pendidikan formal merupakan hal yang jarang dijumpai dalam masyarakat Samin. Masyarakat Samin memiliki ajaran pokok tentang pendidikan, yaitu pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang bermaterikan prinsip dasar etika. Masyarakat Samin tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal atau sekolah dan pendidikan non formal (khusus), anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip dasar etika (Hutomo, 1996: 170). Fenomena inilah yang terjadi pada masyarakat Samin. Tingkat putus sekolah yang tinggi dan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat Samin mengakibatkan tingkat pendapatan atau penghasilan mereka sangat rendah, karena mereka hanya bekerja sebagai petani, buruh tani dan perkebunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat Samin dalam wajib belajar Sembilan tahun. 2). Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Samin dalam wajib belajar sembilan tahun. 3). Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat Samin dalam program wajib belajar sembilan tahun.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Samin dalam wajib belajar sembilan tahun, 2). Untuk mengetahui bentuk-bentuk

partisipasi masyarakat Samin dalam program wajib belajar sembilan tahun, dan 3). Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat Samin dalam program wajib belajar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Desa Klopo Duwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 1). Sumber data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yaitu masyarakat Samin, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, 2). Sumber data sekunder berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu buku, catatan wawancara, rekaman dan internet sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain: 1). Metode wawancara yang ditujukan kepada masyarakat Samin, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, 2). Metode dokumentasi untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari wawancara, bertujuan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, 3). Metode observasi ini bertujuan untuk meneliti secara langsung dengan mendatangi objek yang akan diteliti. Untuk mengecek keabsahan, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan Perangkat Desa Klopo Duwur dengan apa yang dikatakan oleh Masyarakat Samin Desa Klopo Duwur. Teknis analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan langkah analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Samin Dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun di Desa Klopo Duwur Kabupaten Blora.

Masyarakat Samin adalah masyarakat yang terkenal akan pertentangan terhadap pemerintah, masyarakat yang tidak mau menjalankan apa yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat yang tidak mau membayar pajak. Mereka hidup dengan alam, menyendiri dan membentuk kelompok sendiri jauh dari keramaian. Mereka sangat bergantung dengan alam, memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan bagi mereka, menurut mereka alam adalah tempat yang menyediakan semua apa yang mereka butuhkan.

Tetapi hal yang berbeda ditunjukkan oleh masyarakat Samin saat ini, mereka sekarang lebih terbuka dengan masyarakat yang lain, masyarakat yang bukan keturunan Samin. Masyarakat Samin sekarang juga sudah mentaati peraturan pemerintah, sudah mencatatkan dirinya dalam catatan sipil atau berpartisipasi dalam pembuatan KTP, selain itu mereka juga sudah mengenal akan pendidikan formal, tidak seperti zaman dahulu yang melarang anaknya untuk menempuh pendidikan formal. Masyarakat Samin sekarang sudah menjalankan wajib sembilan tahun.

Masyarakat adalah hal yang paling diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap program tersebut, agar program-program tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang telah direncanakan. Keterlibatan tersebut juga merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap bangsa dan negaranya, bukti bahwa mereka dapat menjadi warga negara yang baik, yang dapat melindungi dan menjaga negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan.

Program wajib belajar sembilan tahun, merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, sebagai bekal untuk masa depan. Semua pihak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai wujud perhatian terhadap kesejahteraan rakyat sesuai yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Program ini juga

berlaku pada masyarakat Samin di Desa Klopo Duwur Kabupaten Blora dan masyarakat Samin sudah menjalankan hal tersebut, yaitu ikut dalam wajib belajar.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan membuat masyarakat Samin ikut berpartisipasi dalam wajib belajar sembilan tahun. Bagi mereka pendidikan dapat menjadikan mereka menjadi lebih sukses, dapat memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan dan dapat menambah pengalaman mereka untuk menjadi yang lebih baik di dalam dan di luar masyarakat Samin, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Setiawan (2008: 54) bahwa pendidikan adalah pintu menuju kesejahteraan.

Memang dulu masyarakat Samin tidak mau mengikuti pendidikan formal karena larangan dari orang tua mereka seperti dengan pernyataan Hutomo (1996: 170) bahwa masyarakat Samin tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal atau sekolah dan pendidikan non formal (khusus), anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip dasar etika. Sebetulnya hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Samin dilatarbelakangi oleh bentuk perlawanan terhadap Belanda.

Seperti hal yang diungkapkan oleh Mbah Lasio (sesepuh atau tokoh masyarakat Samin), yaitu jika ditanya mau kemana masyarakat Samin biasa menjawab *ajeng teng ngajeng* (mau ke depan), dan jika ditanya dari mana mereka menjawab *saking wingking* (dari belakang). Pada dasarnya tujuan mereka adalah untuk membuat bingung, selain itu hal tersebut juga diharapkan dapat membuat pemerintahan pada waktu itu tidak mengejar-ngejar untuk dimintai pajak. Mereka beranggapan bahwa negara ini adalah negara orang Indonesia, buat apa mentaati perintah orang yang bukan warga negara Indonesia. Tetapi sekarang masyarakat samin telah mendapatkan pendidikan sekolah selain pendidikan dari keluarga.

Tingkat partisipasi masyarakat Samin dalam wajib belajar sembilan tahun tidak hanya

dilakukan sekedar keinginan hasrat untuk bersekolah, tetapi mereka juga ikut dan aktif dalam kegiatan ekstra kulikuler, misalnya saja silat, musik, pramuka, dan lain-lain. Kegiatan tersebut merupakan bentuk peran dari masyarakat Samin dalam wajib belajar Sembilan tahun selain dari pendidikan di dalam kelas. Tujuan lain dari masyarakat Samin juga dilatarbelakangi oleh pencapaian kesuksesan, menurut mereka pendidikan dapat mengantarkan dan memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan.

Banyak hal yang dapat diambil manfaat dari kegiatan tersebut. Selain untuk memberi kesibukan bagi siswa, siswa juga mendapatkan pelatihan dan ketrampilan di luar pembelajaran, sebagai bekal ketika menghadapi dunia kehidupan dalam masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Soegito (2009: 10) bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan tanpa adanya diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Samin dalam Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam program-programnya. Dalam suatu negara masyarakat adalah tujuan dari setiap program, keberhasilan program tersebut tergantung pada tingkat partisipasi dari masyarakatnya. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat program tersebut tidak akan berjalan, sehingga tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai seperti yang dinyatakan oleh Adisasmita (2006: 36) bahwa partisipasi masyarakat merupakan potensi kekuatan dan peluang.

Masyarakat Samin saat ini sudah ikut berpartisipasi dalam wajib belajar sembilan tahun. Merupakan hal yang tidak biasa jika

dilihat sejarah pada masa lalu dari kepribadian atau perilaku masyarakat Samin. Tetapi saat ini mereka termasuk dalam partisipasi yang aktif, dimana mereka ikut dalam wajib belajar sembilan tahun ini didasari atas kemauannya sendiri, tanpa ada dorongan ataupun paksaan dari orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Verhangen dalam Mardikanto (1994: 320) bahwa tumbuhnya partisipasi masyarakat, pada hakekatnya sangat ditentukan oleh adanya kesadaran warga masyarakat yang bersangkutan.

Sekolah bagi mereka saat ini adalah keharusan. Mereka saat ini sangat antusias dalam mengikuti program tersebut, selain karena kemauan diri sendiri dan orang tua, mereka juga didukung oleh lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Margono Slamet dalam Mardikanto (1994: 320) bahwa kemauan untuk berpartisipasi secara psikologis, kemampuan berpartisipasi dapat muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam diri sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan, atau tekanan dari luar).

Bukti orang tua mendukung anaknya untuk bersekolah adalah para keturunan Samin tidak dilarang untuk menempuh pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 7 ayat (2) bahwa "orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya". Mereka juga tidak dibebani dengan tugas-tugas rumah, jika memang mereka mengerjakan tugas rumah itu karena kemauannya sendiri, selain itu para orang tua juga menyempatkan sedikit waktu luang untuk mengantar dan menjemputnya saat sekolah. memberikan fasilitas kendaraan baik sepeda maupun sepeda motor untuk transportasi ke sekolah.

Keseriusan masyarakat Samin dalam mengikuti pendidikan bukan hanya karena ada biaya dari pemerintah, yang memberikan sekolah gratis. Mereka saat ini memang benar-benar ingin mengikuti pendidikan secara suka reala, karena dalam fikiran mereka saat ini

bahwa sekolah itu penting sebagai bekal untuk mencari kerja dan mejadi orang yang sukses.

Dengan pendidikan pembangunan dapat terlaksana, misalnya saja dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan memberi bekal bagi mereka dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, memberikan ketrampilan dan memberikan mereka pengalaman untuk mereka. Tanpa pendidikan, pengalaman dan ketrampilan tidak akan didapat, sehingga menimbulkan pengangguran karena mereka tidak ada kemampuan yang dapat dijual untuk diperkerjakan. Sesuai dengan pernyataan Yahmin (2009: 223) bahwa Secara konkrit dan praktis, tujuan dan muara akhir dari pendidikan adalah memanusiakan manusia dan menghadirkan identitas manusia sebagai makhluk yang beradab dan diberadabkan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 45 ayat (1) bahwa "setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik". Sebagai pendukung kenyamanan dan kemudahan masyarakat saat mengikuti pendidikan seharusnya pihak sekolah atau pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Adisasmita (2006: 35) bahwa peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil yang dilakukan dalam masyarakat. Kenyamanan dan keamanan dalam belajar mempengaruhi siswa untuk menangkap sebuah informasi yang telah diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Memperhatikan sarana dan prasana atau fasilitas yang diberikan pihak sekolah kepada siswanya akan mempengaruhi kecerdasan, keaktifan dan ketrampilan dalam mencari solusi dan informasi, sehingga dengan fasilitas yang memadai akan membentuk kenyamanan bagi siswa yang membuat mereka nyaman akan ilmu yang disampaikan.

Kesimpulannya bahwa pada saat ini masyarakat Samin telah mengikuti wajib belajar. Mereka berpartisipasi dalam wajib belajar karena kemauannya sendiri, yang didorong oleh cita-cita dan tujuan mereka saat lulus nanti. Dapat dikatakan mereka merupakan partisipasi yang aktif, dengan semua kegiatan yang telah diikuti atau dijalankan dan hasrat yang tumbuh dari dirinya sendiri membuat mereka tergolung dalam partisipasi aktif.

Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Samin dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Untuk sekarang ini pendidikan belum berjalan sempurna, tingginya tingkat putus sekolah baik dari desa maupun kota, memberi gambaran bahwa wajib belajar belum mengarah pada sasaran. Banyaknya kendala yang dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah. Misalnya saja dari jumlah sekolah yang ada di Indonesia tidak seimbang dengan banyaknya siswa yang ingin masuk sekolah, sehingga kesempatan mereka untuk mengikuti pendidikan sangat terbatas.

Dari aspek ekonomi juga merupakan akibat dari putus sekolah. Ekonomi dari masyarakat, dapat dikatakan dibawah kesejahteraan menyebabkan mereka yang kurang beruntung mengambil tindakan untuk tidak sekolah, mengambil tindakan untuk berperang melawan kemiskinan dan kelaparan. Tidak semua masyarakat Samin mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sembilan tahun.

Di antara mereka masih ada yang tidak bersekolah, mereka hanya mengikuti pendidikan di tingkat SD dan tidak dapat melanjutkan ke SMP. Penyebabnya adalah karena keadaan ekonomi orang tua, yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan tetapi memilih untuk bekerja. Kendala lain adalah karena minat dan kemauan mereka untuk bersekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh Mutrofin (2009: 94) bahwa latar belakang dari masyarakat akan mempengaruhi apakah masyarakat ikut berpartisipasi atau tidak berpartisipasi.

Tingkat pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi sejauh mana mereka akan

mengikuti program dari pemerintah, dalam hal ini adalah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin besar pendapatan orang tua semakin besar pula peluang untuk menyekolahkan anaknya, tetapi dengan tingkat pendapatan yang rendah kemungkinan besar mereka untuk tidak ikut berpartisipasi dalam program pemerintah yaitu wajib belajar sembilan tahun.

Selain ekonomi pengaruh sosial masyarakat Desa Klopo Duwur yang membuat masyarakat Samin tidak melanjutkan wajib belajar sembilan tahun. Ajakan untuk bekerja keluar daerah dan dengan keadaan masyarakat Samin yang masih ingin mencari kesejahteraan, merekapun memutuskan untuk langsung bekerja dan meninggalkan bangku sekolah demi mencapai kesejahteraan. Secara tidak langsung lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi kemana arah, pandangan dan tujuan seseorang dalam menyikapi hidup.

Kebudayaan yang dahulu diyakini oleh masyarakat Samin semakin lama-kelamaan semakin memudar, meskipun tidak semuanya. Larangan untuk mendidik anak mengikuti pendidikan formal sudah terhapuskan seperti pernyataan Hutomo (1996: 170) bahwa tidak diperbolehkan mendidik anak melalui pendidikan formal atau sekolah dan pendidikan non formal (Khusus), anak hanya dibekali pendidikan informal (pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip dasar etika. Sekarang mereka sudah dapat mengikutinya sesuai kemampuan mereka masing-masing.

Sekarang sekolah merupakan prioritas orang tua untuk mendidik anak-anaknya, meskipun tidak sepenuhnya keturunan Samin mendapatkan pendidikan dari Sekolah. masih ada pendidikan-pendidikan atau ajaran yang disampaikan keluarga untuk anaknya, yaitu ajaran tentang hidup di dunia.

Ketika masyarakat Samin sudah tidak bersekolah, mereka langsung melanjutkan untuk mencari pekerjaan, biasanya mereka bekerja sebagai buruh tani atau merantau di tempat lain. Ada beberapa diantara mereka yang

pengangguran karena putus kerja, tapi mereka memanfaatkan lahan di hutan sebagai tempat bercocok tanam seperti yang dinyatakan oleh Hutomo (1996: 135) bahwa enggan berdagang karena mereka bercocok tanam cabai, jagung, kacang, dan sebagainya. Mereka tidak suka berprofesi sebagai pedagang karena seringkali terjadi kecurangan dalam praktek transaksi jual beli.

Masyarakat Samin memanfaatkan hutan sebagai bentuk mereka dalam memenuhi kebutuhan. Hutan adalah segalanya bagi kelangsungan hidup mereka, hutan menyediakan apapun yang dibutuhkan bagi mereka. Alasan mereka memanfaatkan hutan sebenarnya karena mereka tidak memiliki sawah atau lahan untuk bercocok tanam. Meskipun terlihat mereka sedang menggarap sawah, tapi sebenarnya itu bukanlah sawah atau lahan milik mereka sendiri melainkan sawah atau lahan milik orang lain yang nanti hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik lahan tersebut

SIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat Samin dalam wajib belajar sembilan tahun sudah terlihat dari keterlibatan mereka saat mengikuti wajib belajar. Keterlibatan masyarakat Samin tidak hanya saat di kelas saja melainkan diluar kelas saat mengikuti kegiatan ekstra kulikuler. Kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat masyarakat Samin ikut berpartisipasi dalam wajib belajar sembilan tahun, bagi mereka pendidikan dapat menjadikan mereka menjadi lebih sukses.

Bentuk partisipasi masyarakat Samin terhadap wajib belajar sembilan tahun berbeda-beda, ada yang disebabkan karena diri sendiri dan ada juga yang disebabkan karena pengaruh lingkungan. Rata-rata dari mereka ikut berpartisipasi dalam wajib belajar sembilan tahun itu muncul karena dari dirinya sendiri sehingga dapat dikatakan masyarakat Samin sudah berpartisipasi aktif dalam program wajib belajar sembilan tahun. Orang tua sebagai sumber motivasi dan kontrol bagi anak-anaknya terhadap pembelajaran di sekolah sudah

dilakukan, sering kali orang tua memberikan wejangan atau perintah untuk serius dalam mengikuti sekolah dan selalu memperingatkan anak Samin untuk selalu belajar saat malam hari.

Faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat Samin dalam program wajib belajar sembilan tahun itu dipengaruhi dari kemampuan orang tua. Orang tua yang hanya bekerja sebagai buruh tani menyebabkan beberapa anak dari keturunan Samin tidak melanjutkan sekolah sampai Sekolah Tingkat Pertama. Pendapatan orang tua yang menyebabkan mereka memilih untuk membantu orang tua dan mencari pekerjaan di luar daerah. Pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhi dan mengajak masyarakat Samin untuk bekerja keluar daerah, memberikan pandangan bagi masyarakat Samin untuk tidak melanjutkan sekolah dan memutuskan untuk bekerja. Kebudayaan Samin yang memberikan larangan untuk tidak mendidik anak dengan pendidikan formal sudah tidak berlaku dan luntur dimakan jaman yang sudah modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hutomo, Suripan, Sadi. 1996. *Kebudayaan Blora*. Semarang: Citra Almamater.
- Mardikanto, Totok 1994. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. Solo. Universitas Sebelas Maret Press.
- Mutrofin. 2009. *Mengapa mereka tak bersekolah*. Jakarta: LaksBang PRESSindo.
- Setiawan, Benni. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soegito, A.T, dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT UNNES PRESS.
- UU Sistem Pendidikan Nasional. 2012. *UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Laksana.

UU Wajib Belajar. 2012. *UU No 47 Tahun 2008* tentang *Wajib Belajar*. Jogjakarta: Laksana.

Yahmin, Moh. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.